

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat menguntungkan bagi pemerintah, pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait dengan persoalan promosi dan pengembangan pariwisata dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan pengunjung wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dalam rangka meningkatkan promosi kepariwisataan di Indonesia pemerintah harus mampu memanfaatkan kondisi tersebut, terutama di daerah pedalaman yang masih belum terjangkau dan terjamah oleh manusia, wisatawan manca negara lebih menyukai wisata yang masih alami keasliannya dari pada wisata yang sudah terjamah oleh manusia, kondisi seperti itulah yang dapat menarik banyak wisatawan manca negara (Ali, Amil,dan Zuhadi,2018).

Pariwisata adalah kunci pembangunan dan kesejahteraan. Pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam hal pembangunan yang ada di indonesia hal itu didukung adanya peninggalan sejarah, kekayaan hayati flora dan fauna. Pariwisata juga sangat berperan dalam memberikan pemasukan bagi negara. Pemerintah indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional (Istiyani dan Yuniningsih, 2019).

Pariwisata semakin mendapat perhatian dari pemerintah selain untuk menambah pemasukan negara juga untuk meningkatkan daya saing nasional. Penelitian oleh Amnar, Muhammad, dan Syechalad tahun 2017 mengatakan terdapat pengaruh yang positif terhadap pendapatan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata merupakan kunci pembangunan dan perlu di kembangkan, pengembangan pariwisata dilakukan secara serempak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Peraturan tersebut merangkum tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi jawa tengah tahun 2012-2027. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Pengembangan dari area tersebut supaya terkelola dengan baik dan bisa memberi manfaat baik bagi pengelola pariwisata dan wisatawan, maka perlunya tata kelola pada pengembangan pariwisata.

Tata kelola adalah suatu perilaku atau metode yang digunakan oleh suatu instansi untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. Manfaat yang diberikan oleh adanya tata kelola bagi instansi salah satunya adalah kinerja lingkungan perusahaan yang baik. Tata kelola menjadi tolak ukur dalam menjamin kesuksesan visi dan misi organisasi. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat indikator dalam pelaksanaan tata kelola, yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif, dan koordinasi. Indikator tata kelola tersebut sebagai tolak ukur pemerintah terhadap pengembangan instansi. Keanekaragaman budaya serta kekayaan alam sangat memiliki potensi wisata yang sangat besar dan perlu tata kelola yang baik agar menciptakan daya tarik wisatawan, salah satunya daerah yang kaya dengan potensi di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Semarang. Kabupaten Semarang salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi di bidang pariwisata (Tinggi, 2004).

Kabupaten Semarang terkenal dengan wisata alamnya karena letaknya yang berada di dekat pegunungan Ungaran, seperti wisata Rawa Pening, Gunung Ungaran, Museum kereta api ambarawa, air terjun semarang, curug lawe, dan Candi Gedong Songo. Tetapi hanya satu tempat wisata yang memiliki candi di kabupaten semarang yaitu wisata candi gedong songo. Candi Gedong Songo berlokasi di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Indonesia. Seperti

namanya yaitu Candi Gedong Songo bukan merupakan bangunan candi saja tetapi merupakan kompleks candi.

Di dalam Obyek Wisata Candi Gedong Songo terdapat sebuah wisata baru yang bernama Ayanaz Gedong Songo. Wisata Ayanaz Gedong Songo di resmikan dan di buka umum pada 11 juni 2018, lokasi Ayanaz Gedong Songo ini ada di dalam kawasan Wisata Candi Gedong Songo, secara tidak langsung pengunjung harus membeli tiket Candi Gedong Songo terlebih dahulu guna mendapatkan akses ke wisata Ayanaz Gedong Songo. Pada saat awal pengunjung mengunjungi wisata Candi Gedong Songo pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- setelah itu bagi pengunjung yang akan memasuki wisata Ayanaz Gedong Songo akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 20.000,- untuk orang dewasa, sedangkan anak dibawah 2 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- dan hari libur nasional akan dikenakan biaya Rp 25.000,- untuk loket masuk wisata Ayanaz Gedong songo.

Ada yang menarik dalam pengelolaan Candi Gedong Songo dan Ayanaz Gedong Songo, dimana dalam pengelolaan wisata tersebut masing – masing dikelola pemerintah dan pihak swasta, Candi Gedong Songo yang di kelola oleh pemerintah dan Ayanaz Gedong songo yang di kelola oleh pihak swasta. Walaupun berbeda terkait penghasilannya yang diterima oleh Candi Gedong Songo dan Ayanaz Gedong Songo akan tetapi pemerintah dan pihak swasta berkomitmen untuk melakukan kerjasama di dalam bidang retribusi tiket masuk. Ini cukup mendongkrak pengunjung

yang memasuki Wisata Candi Gedong Songo karena adanya suatu pembaruan di dalam Candi Gedong Songo yaitu Ayanaz Gedong Songo, dimana pengunjung harus membayar tiket masuk Wisata Candi Gedong Songo sebelum memasuki Ayanaz Gedong Songo. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan pengunjung yang signifikan di Wisata Candi Gedong Songo yang di rilis oleh BPS Kabupaten Semarang. Berikut ini merupakan data pengunjung Candi Gedong Songo selama 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1

Pengunjung Candi Gedong Songo

Tahun	Jumlah Pengunjung	
	Domestik	Asing
2014	299.141	1.569
2015	325.220	1.569
2016	345.594	1.729
2017	345.806	1.538
2018	670.610	1.682

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2019

Hal ini lah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap Wisata Candi Gedong Songo, dimana pada 4 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan pengunjung yang signifikan dengan berbagai macam wisatanya, barulah pada tahun 2018 setelah pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, pengunjung pada wisata Candi Gedong Songo mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan hingga dua kali lipat jika di

bandingkan pada tahun sebelumnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengatakan bahwa keterbatasan lahan milik pemerintah tidak dimungkinkan untuk adanya pengembangan di Obyek Wisata Candi Gedong Songo, maka dari itu keterlibatan pihak swasta dengan membangun Ayanaz Gedong Songo bisa mendongkrak pengunjung Obyek Wisata Candi Gedong Songo.

Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengungung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan wisata Candi Gedong Songo memiliki potensi untuk memajukan obyek wisata dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak kolaborasi, dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus. Konsep *Collaborativ Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan obyek wisata. *Collaborativ Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengungung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama dan meringankan beban pemerintah (Febrian, 2018).

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program.

Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Ada beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan yang pertama yaitu meningkatkan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut, yang kedua mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program, dan yang ketiga mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah (Tasruddin, 2018).

Oleh karena itu nantinya penulis ingin meneliti bagaimanakah kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta terkait pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedong Songo.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang dan faktor apa yang mempengaruhinya ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis membuat penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan bagaimana kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Songo dan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi dalam kolaborasi pemerintah dengan swasta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi stakeholder dalam berkolaborasi yang mana dilakukan pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan pariwisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang Tahun 2018.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penelitian maupun pembaca mengenai kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang.

1.5 STUDI TERDAHULU

Dalam penelitian ini menggunakan dua belas literatur review yang berbeda-beda yang akan dipaparkan sebagai berikut, yang pertama penelitian tentang tata kelola pengembangan pariwisata kabupaten tuban tahun 2018, dengan penelitian tentang perkembangan tata kelola obyek dan daya tarik wisata budaya keraton surakarta. Kedua penelitian tersebut mempunyai fokus yang hampir sama karena menyoroti perkembangan tata kelola dalam pariwisata untuk mewujudkan pengelolaan yang baik. Persamaan kedua penelitian sebelumnya dan peneliti ini ada kesamaan yaitu sama-sama mengembangkan tata kelola pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Yang kedua penelitian tentang implementasi kebijakan collaborative governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada badan promosi daerah kabupaten lombok utara, dengan penelitian tentang peran dinas pariwisata dalam tata kelola dan promosi kawasan pariwisata (studi kasus di kecamatan pemenang kabupaten lombok utara). Dalam dua penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan pariwisata dalam bidang promosi pengembangan pariwisata untuk menarik wisatawan.

Yang ketiga penelitian tentang kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata religi sunan giri di kabupaten gersik, dengan penelitian kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten sinjai sulawesi selatan. Kedua

penelitian tersebut menjelaskan tentang berkolaborasi untuk mengembangkan pariwisata agar terciptanya daya tarik wisatawan.

Dari seluruh literature review penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana peneliti akan memfokuskan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan obyek wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang Tahun 2018 sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dan ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya. Berikut ini penjelasan ringkasan dari keseluruhan literature review dari beberapa peneliti :

TABEL 1.2
STUDI TERDAHULU

NO	Penulis	Judul	Ringkasan
1	Septyana Tri Rahayu, M Lukman Hakim, Restu Karlina Rahayu (2018)	Tata Kelola Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2018	Hasil penelitian yaitu ini Kabupaten Tuban memiliki potensi wisata diantaranya wisata religi, alam, dan sejarah budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Hal tersebut dibuktikan bahwa setiap tahun jumlah pengunjung selalu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, sehingga masih memiliki peluang untuk menjadi sebuah Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dalam pengelolaannya, Kabupaten Tuban sudah

			dapat mengaplikasikan keseluruhan fase untuk menarik minat pengunjung. Faktor penghambatnya yaitu minimnya anggaran, kurang memperhatikan pengembangan objek wisata atas promosi dan minimnya SDM dalam mengelola pariwisata di Tuban.
2	Astuti Umar, Burhanuddin, Nasrulhaq (2019)	Kolaborasi Aktor Dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan	Dari hasil penelitian ini bahwa perkembangan pariwisata di hutan mangrove Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai terjadi karena ketidak sejahteraan internal yang sulit ditangani, arahan pengembangan yang stagnan, dan terbatasnya kapasitas manajemen, sementara kebutuhan atau keinginan komunitas / masyarakat / netizen terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi. Jadi perlunya perubahan aktif dari tokoh untuk memobilisasi dan mengorganisir pengembangan.
3	M Taufik Rachman, Baiq Reinelda Tri Yunarni, Teguh Dwiatma (2019)	Peran Dinas Pariwisata Dalam Tata Kelola Dan Promosi Kawasan Pariwisata (Studi Kasus di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara)	Hasil penelitian ini yairu strategi pengembangan promosi pariwisata banyak dilakukan negara berkembang untuk memperkuat perekonomian nasional. Sektor industri pariwisata diyakini menjadi sektor yang dapat memajukan perekonomian. Permasalahan yang harus dipecahkan yaitu

			<p>mengenai pengelolaan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata. Adanya Dinas Pariwisata akan mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah dengan cara penyerapan tenaga kerja di tempat wisata. Di Kecamatan Pemenang, adanya Dinas Pariwisata dapat membantu masyarakat sekitar dalam menyediakan lahan untuk kegiatan usaha serta dapat memberikan dana atau pelatihan sesuai bidang usaha yang dijalankan oleh anggota pokdarwis.</p>
4	Muhammad Ali, Amil, dan Zuhadi (2018)	Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara	<p>Dari hasil penelitian ini bahwa sektor pariwisata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara. Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan</p>

			<p>promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis.</p>
5	Monica Pramudyasari, RB Soemanto (2016)	Perkembangan Tata Kelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya Keraton Surakarta (Studi Fenomenologi terhadap Pengelola dan Wisatawan Keraton Surakarta)	<p>Wisatawan memaknai simbol obyek wisata maupun atraksi budaya sebagai simbol kebudayaan, identitas bangsa, serta cerminan nilai dan norma jawa. Wisatawan yang telah mengunjungi keraton Surakarta menilai masih kurangnya inovasi mengenai produk wisata, kurang terawatnya bangunan dan benda koleksi museum, serta kurangnya tanda dan penjelasan dalam Bahasa Inggris. Dengan melihat motivasi budaya dan fisiologi wisatawan serta penilaian terhadap obyek wisata Kraton Surakarta, dapat diketahui minimnya wisatawan yang berkunjung dikarenakan pengelolaan yang kurang maksimal. Informasi yang diperoleh wisatawan mengenai Keraton Surakarta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya</p>

6	Lutfi Andrianto Leman (2018)	Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kolaborasi tiap stakeholder dalam sektor pengembangan pariwisata sunan giri gresik, penelitian ini di latar belakang oleh suksesnya manajemen pariwisata religi sunan giri. Stakeholder yang berperan dalam pengembangan pariwisata sunan giri gresik ini yaitu wisatawan dan instansi budaya terkait sebagai pembuat kebijakan dan kordinator pariwisata tersebut, UPT sunan giri selaku fasilitator mengatakan bahwa makam sunan giri selalu dikunjungi wisatawan untuk obyek wisata, dan penduduk desa sebagai akselerator. Kolaborasi antara stakeholder tersebut dalam usahanya mengembangkan pariwisata religi sunan giri menunjukkan adanya desain arahan dari institusi yang mana peran masing-masing stakeholder tidak terganggu dan dimensi kesuksesan dari hasil tersebut terlihat dari rencana kerja yang tertarget sebagai indikator pengukuran kolaborasi tersebut.</p>
7	Ranggi Ade Febrian (2018)	Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>Hasil penelitian ini bahwa konsep <i>Collaborative Governance</i> sebagai basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan</p>

			perdesaan sebagai sebuah solusi bagi pihak yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan kawasan perdesaan dalam bentuk kebijakan atau pun penelitian
8	Ni Ketut Ratih Larasati dan Dian Rahmawati (2017)	Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan Pada Kampung Lawas Maspati, Surabaya	<p>Dari hasil penelitian ini bahwa lemahnya peran pemerintah dalam mengelola aset budaya khususnya dalam pemanfaatannya sebagai daya tarik pariwisata, dan kecenderungan modernisasi perkotaan dan pembangunan kota yang mengancam eksistensi dari Kampung Lawas Maspati. Tujuan dalam penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Kampung Lawas Maspati berada pada posisi yang menguntungkan dengan faktor kekuatan dan peluang yang dominan dan <i>growth strategy</i> sebagai fokus utama strategi pengembangan.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal, terdapat empat strategi utama pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang dapat diimplementasikan pada Kampung Lawas Maspati diantaranya adalah strategi optimalisasi pengelolaan pariwisata budaya, strategi optimalisasi potensi home based enterprises pada</p>

			kampung untuk mendukung kegiatan pariwisata, pemanfaatan budaya intangible pada kampung sebagai produk pariwisata budaya dan pengelolaan aset budaya tangibe pada kampung melalui peluang kerja sama.
9	Sugiyarto, Rabith Jihan Amaruli (2018)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Tujuan penelitian adalah menganalisis pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Jawa Tengah yang dikemas dalam bentuk festival. Untuk menganalisis potensi dan permasalahan pada pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal pada masing-masing lokasi penelitian termasuk potensi dan permasalahan internal maupun eksternal. Budaya lokal khususnya di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara secara umum memiliki potensi unik dan sentra produk kerajinan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata budaya lokal. Strategi peningkatan wisata budaya lokal yang dirumuskan berdasarkan <i>strength</i> , <i>weakness</i> , <i>opportunity</i> dan <i>threats</i> budaya lokal. Strategi pengemasan budaya lokal khususnya budaya lokal Kabupaten Demak, budaya lokal Kabupaten Kudus, dan budaya lokal Kabupaten Jepara. Keberadaan Jateng

			Fair dapat dijadikan media promosi dan pengenalan daerah tujuan wisata (DTW) budaya lokal.
10	Muchamad Zaenuri (2018)	Tata Kelola Pariwisata-Bencana berbasis <i>Collaborative Governance</i> Konsep, Analisis dan Pemodelan	Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mengevaluasi <i>Collaborative Governance</i> dalam tata kelola pariwisata-bencana di volcano tour merapi. Dalam penelitian ini menghasilkan tesis yang berbeda dengan berbagai teori <i>Collaborative Governance</i> bahwa dalam pariwisata-bencana <i>Collaborative Governance</i> mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi formal, dari komando menjadi kolaborasi dan dari <i>shared vision</i> menuju kemitraan. Penelitian ini menjelaskan secara detail bagaimana transformasi yang terjadi dalam kolaborasi dalam bidang pariwisata, dan khususnya pada saat setelah bencana terjadi.
11	Fuad Amsyari (2018)	Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Religi Di Makam Sunan Ample Kota Surabaya	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara pemangku kepentingan Wisata Religi Sunan Ampel di kota Surabaya. Ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pengelolaan wisata religi Sunan Ampel dalam hal ini yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah

			wisatawan di Sunan Ampel banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata religi Sunan Ampel.
12	Abdul Kholiq Azhari (2019)	Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata Alam : Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah	Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengelola obyek wisata secara optimal, kreativitas dan partisipasi pengelolaan obyek wisata alam, yang di dukung oleh aspek yuridis, segi kelembagaan, sarana prasarana, anggaran dan aparatur adalah pada Era Otonomi Daerah. Otonomi daerah mendorong kolaborasi dan kerja sama pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada pardigma <i>Reinventing Government</i> dan <i>Good governance</i> . Karena itu kebijakan otonomi daerah dapat mereduksi berbagai kendala pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom, sehingga pengelolaan obyek wisata alam yang berkualitas dan profesional, dapat diwujudkan di masa kini dan masa depan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang tata kelola pengembangan obyek wisata dan kolaborasi antar stakeholders dalam membantu meningkatkan daya tarik pengunjung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang akan diteliti, sedangkan pada sebagian penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian pendekatan fenomenologi transendental yang berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari partisipan, dan metode kuantitatif dimana peneliti menggunakan instrumen berupa kuisioner yang harus di isi oleh responden.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan maksud untuk merefreskan pikiran. Ada banyak pengertian tentang pariwisata diantaranya yaitu :

Spillane (1994) dalam Hadiwijoyo (2012:41). Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu.

Ramaini (1992:1). Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Mathieson dan Wall dalam Sujali (1989:2). Pariwisata merupakan gerakan orang atau penduduk secara sementara dalam batas daerah tertentu dengan melakukan aktifitas.

Dari beberapa pengertian pariwisata di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa jenuh, dengan cara menikmati hal-hal yang menyenangkan seperti keindahan alam, dari satu tempat ke tempat lain dalam kurun waktu sementara.

Menurut Pitana dan Diarta (2009:134) strategi pengembangan pariwisata harus mampu menggabungkan aspek-aspek penunjang kesuksesan dunia pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek transportasi dan saluran pemasaran, infrastuktur pariwisata, interaksi sosial dan keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan terhadap dampak pariwisata, resistensi komunitas lokal dan lain-lain (Kurniawati, Hamid, Hakim, 2018).

Menurut spillane (1994:63-72) dalam Handiwijoyo (2012) mengatakan bahwa dalam pengembangan suatu obyek wisata sebagai daerah tujuan wisata (*destination*), harus memperhatikan lima unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanan wisatanya, lima unsur destinasi wisata tersebut meliputi :

- a. Daya tarik wisata dan atraksi wisata yang mampu menarik pengunjung.
- b. Fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan dan keperluan wisatawan.
- c. Infrastruktur dasar yang tersedia untuk kebutuhan wisatawan.

- d. Transportasi menunjang dan mendukung mobilitas wisatawan.
- e. Keramah tamahan masyarakat lokal kepada wisatawan.

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Potensi obyek dan daya tarik wisata dibedakan menjadi tiga (Hadiwijoyo, 2012:49) yaitu:

- a. Obyek wisata alam

Obyek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Contohnya :pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, dan taman laut.

- b. Obyek wisata sosial budaya

Obyek wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukan.

c. Obyek wisata minat khusus

Obyek wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Contohnya : wisata agro, wisata kesehatan.

1.6.2 Kolaborasi

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash Collaborative governance adalah tipe pemerintah dimana publik dan swasta bekerja secara kolektif dengan cara berbeda atau dengan caranya masing-masing, dengan proses tertentu untuk mempertahankan hukum dan peraturan untuk ketentuan kepentingan publik (Ansell dan Gash, 2007:545). Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

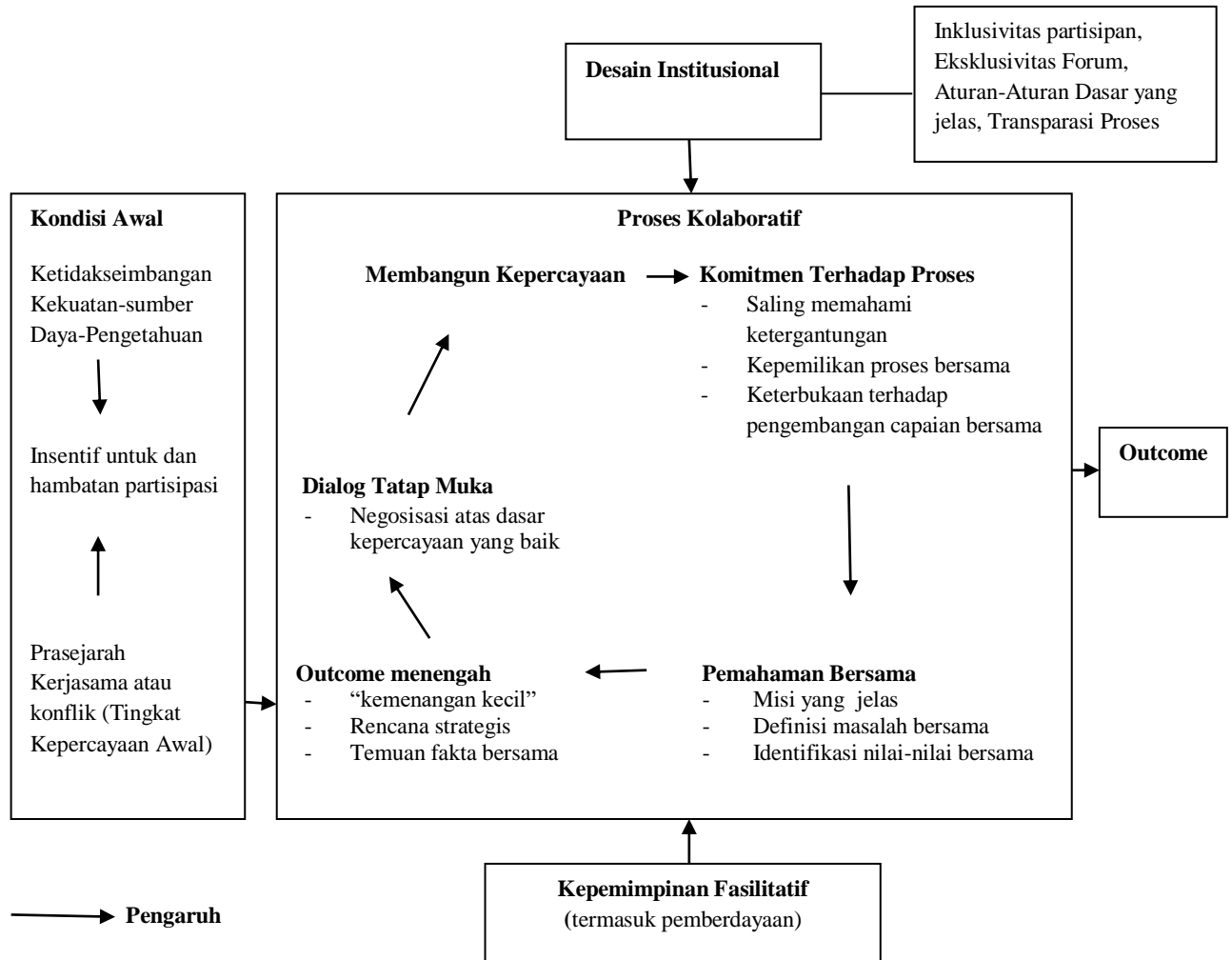
Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan collaborative governance dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance (Arrozaaq, 2016).

Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash yaitu kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidak seimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1.1

Model Collaborative Governance Ansell And Gash



Sumber : Ansell and Gash, 2007

Menurut Anshell dan Gash (2007) Proses Kolaboratif terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*) dan kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*).

Proses kolaboratif ini merupakan variabel yang penting dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para *stakeholders* tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para *stakeholders* memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai collaborative governance dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan bahwa Collaborative Governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan collaborative governance dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dilihat bahwa aspek

kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaboasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa collaborative governance atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggraan pemerintahan secara keseluruhan. Collaborative governance dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan tersana lebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi (Tresiana dan Duadji, 20017).

1.6.3 Tata Kelola Pariwisata

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada mulanya banyak dilakukan oleh pemerintah tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata yang semakin meningkat dan ketika kapasitas pemerintah semakin terbatas, maka keterlibatan swasta dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata adalah sebuah

keniscayaan. Kondisi yang seperti ini memungkinkan untuk melihat permasalahan pariwisata dari perspektif *governance*.

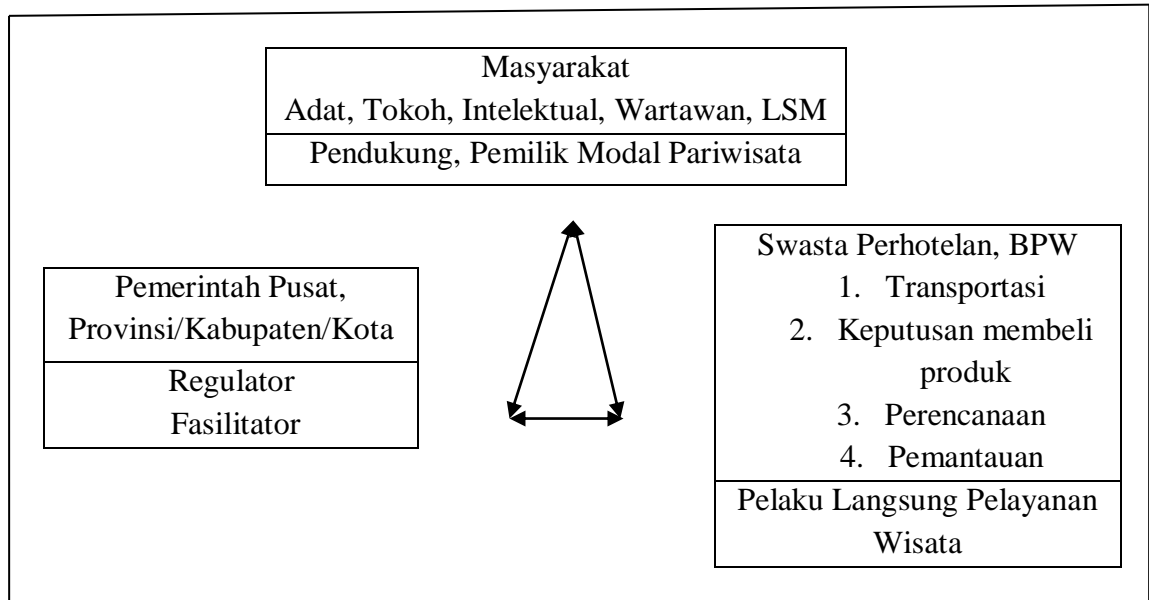
Sehubungan dengan hal tersebut maka model tata kelola pariwisata disusun hingga menyangkut beberapa perubahan dalam hal :

1. Mengembangkan tata kelola pariwisata yang tidak sekedar menyesuaikan dengan perubahan lingkungan (adaptif) tetapi lebih bersifat akseleratif.
2. Perumusan kebutuhan bersama yang saling menguntungkan diantara stakeholder.
3. Diperlukannya lembaga yang dapat menggerakkan dan menyelaraskan dari seluruh kepentingan stakeholder.
4. Mengarahkan segala bentuk kolaborasi menuju kepada kemitraan (partnership) untuk jangka waktu yang panjang.

Kjaer (2004) mendefinisikan *governance* sebagai proses baru yang mengatur di mana berbagai aktor mengelola arena publik melalui interaksi timbal balik. Diperkuat oleh pernyataan Kim (2010) mengidentifikasi beberapa definisi mengenai *governance* yang pada intinya berupa sistem tata kelola yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat (Zaenuri, 2018). Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1.2

Sektor Pariwisata dalam Tiga Pilar Governance



Sumber : Muchamad Zaenuri 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa penerapan konsep *governance* pada pariwisata sudah dikemukakan oleh Pitana (2005: 96-97) dalam Bovaird & Loffler (2009) yakni membahas aktor yang terlibat dan bekerjasama dalam sistem kepariwisataan, konsep tentang aktor-aktor yang terlibat dalam sistem kepariwisataan sebenarnya mengacu pada tiga pilar *governance*. Dalam ketiga pilar tersebut dapat berjalan dengan baik jika para *stakeholder* saling berinteraksi dengan tujuan yang sama (Zaenuri, 2018).

Dalam sistem kepariwisataan terdapat banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem itu. Aktor tersebut adalah para pelaku pariwisata yang ada di berbagai kalangan. Secara umum para pelaku tersebut dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu pemerintah, swasta,

dan masyarakat. Yang masuk pemerintah adalah pemerintah pada berbagai wilayah administratif, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah lokal serta desa yang berfungsi sebagai regulator atau fasilitator, kelompok swasta meliputi asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha/industri pariwisata sebagai pelaku langsung pelayanan wisata, dan masyarakat termasuk didalamnya tokoh-tokoh masyarakat, kelompok komunitas tertentu, intelektual, LSM dan media yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata (Zaenuri, 2018).

1.7 DEFINISI KONSEPSIONAL

Konsep merupakan suatu pemikiran umum untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta menentukan variabel yang meliputi keadaan suatu kelompok ataupun individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa jenuh, dengan cara menikmati hal-hal yang menyenangkan seperti keindahan alam, dari satu tempat ke tempat lain dalam kurun waktu sementara.
- b. Kolaborasi adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan

yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

- c. Tata Kelola Pariwisata adalah sebagai proses baru yang mengatur di mana berbagai aktor mengelola arena publik melalui interaksi timbal balik.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik – karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variable yang ditelitinya (Azwar, 2011). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah model kolaborasi Ansell and Gash yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

- a. Prasejarah kerjasama

kondisi awal kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam memberdayakan Obyek Wisata Candi Gedong Songo bermula dari Ibu Ida selaku pihak swasta yang terlebih dahulu mempunyai villa penginapan di sekitar Candi Gedong Songo yang dinamakan villa putih dan Ibu Ida melihat adanya peluang bisnis dengan memanfaatkan era kekinian yaitu membangun destinasi wisata di sekitar

Candi Gedong Songo dengan spot foto *instagramable* bernuansa alam yang di beri nama Ayanaz Gedong Songo.

2. Desain Institusional

a. Aturan-aturan dasar yang jelas

Pihak pemerintah dan pihak swasta menghasilkan keputusan bersama untuk bekerjasama dalam bidang tiket masuk dan pedagang di kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo harus asli masyarakat sekitar desa candi dan membayar sewa kios.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

a. Pemberdayaan

Pihak pemerintah dan pihak masyarakat menyatakan bahwa perluasan lahan parkir dan adanya jasa kuda berpengaruh dalam memberdayakan Obyek Wisata Candi Gedong Songo dan dari pihak swasta menyatakan bahwa untuk memberdayakan Ayanaz Gedong Songo mengutamakan mutu agar pengunjung merasa puas.

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog tatap muka

Proses dialog tatap muka tersebut dilakukan untuk memperoleh perijinan pembangunan Obyek Wisata Ayanaz Gedong Songo dari Pemerintah Desa. Selain itu, proses dialog yang dilakukan secara tatap muka juga terjadi antara

Ibu Ida selaku pihak swasta dengan Bapak Sarwono selaku seksi pengembangan daya tarik wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dimana saat itu memberikan ijin untuk memberikan jalan akses masuk Ayanaz Gedong Songo melewati jalan akses Candi Gedong Songo dan memberikan dukungan kepada Ibu Ida untuk mengembangkan Obyek Wisata Candi Gedong Songo dengan adanya Ayanaz Gedong Songo.

b. Membangun kepercayaan

Pihak pemerintah dan pihak swasta dalam membangun kepercayaan bersifat penyelarasan, yaitu terlihat ketika pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan pihak swasta ikut serta andil dalam mempromosikan Obyek Wisata Candi Gedong Songo dan Ayanaz Gedong Songo.

c. Komitmen terhadap proses

komitmen terhadap proses yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mensejahterakan masyarakat sekitar Desa Candi dengan cara memberikan fasilitas seperti kios dan kandang kuda untuk mencari nafkah dan mengembangkan Candi Gedong Songo.

d. Pemahaman bersama

Dalam tahap pemahaman bersama masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penumpukan sampah di Candi Gedong Songo yang sangat mengganggu masyarakat dan ketidak pahaman antara pihak pemerintah dengan pihak swasta,

e. Hasil

Dengan adanya pihak swasta Ayanaz Gedong Songo dapat meningkatkan penghasilan yang signifikan, disini pihak pemerintah sangat diuntungkan dengan adanya pihak swasta sebagaimana pula dengan pihak swasta juga merasa untung dengan menggandeng nama Gedong Songo, tidak hanya itu saja dengan adanya swasta masuk di daerah Candi Gedong Songo sekarang banyak investor-investor yang membangun obyek wisata juga di daerah Candi Gedong Songo.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulis maka tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Dian Eka Rahmawati (2014 : 13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi (Nurdin, 2015).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena di Desa Candi terdapat obyek wisata Candi Gedong Songo yang saat ini sedang naik daun dengan adanya wahana baru yang bernama Ayanaz Gedong Songo. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan obyek wisata Candi Gedong Songo.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikonto (2016) subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang dan tempat sebagai data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan. Subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data yang akan diamati

didapatkan. Teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Maksud dari teknik purposive yaitu memilih dengan sengaja subjek yang akan diwawancarai.

Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Candi, Investor Objek Wisata Candi Gedong Songo dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam pengelolaan.

Tabel 1.3
Subjek Penelitian

No	Narasumber	Keterangan
1	Bapak Sarwono	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
2	Bapak Sudarwanto Bapak Puryono	Pemerintah Desa Candi
3	Ibu Ida	Pimpinan Ayanaz Gedong Songo
4	Bapak Karto Ibu Rosi Mas Bagus	Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Objek Wisata Candi Gedong Songo

1.9.4 Unit Analisis Data

Unit analisis data pada penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Candi, Investor Objek Wisata Candi Gedong Songo dan Masyarakat sekitar yang terlibat dalam pengelolaan Candi Gedong Songo.

Tabel 1.4

Unit Analisis Data

Stakeholders Objek Wisata Candi Gedong Songo	Jumlah Responden
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	1
Kepala Desa Candi	1
Kepala Dusun	1
Pimpinan Ayanaz Gedong Songo	1
Masyarakat	3

1.9.5 Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penelitian ini adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Demi mendukung kelengkapan pembahasan penelitian ini, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu pengelola yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan mengenai kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang. Data primer dalam objek penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang,

Pimpinan Ayanaz Gedong Songo, Kepala Desa Candi, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Merupakan dasar penyusunan skripsi yang berisi informasi yang dibahas berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web dan internet.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang mempunyai maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan atau bisa disebut juga (*interviewer*) dan terwawancara yaitu sebagai yang memberikan suatu jawaban yang relevan dan dirasa tau mengenai suatu informasi tertentu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (*interview*) menurut Moleong (2004:186). Jadi wawancara itu mempunyai tujuan untuk menggali informasi lebih dalam dari narasumber, oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Sedangkan dalam melakukan wawancara ada dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada

narasumber yang sudah tersusun sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak menggunakan daftar pertanyaan (spontan) akan tetapi hanya berdasarkan pedoman pertanyaan yang dibuat secara garis besar saja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam tata kelola pengembangan Obyek Wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang, penelitian ini akan mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pimpinan Ayana Gedong Songo, Kepala Desa Candi, Kepala Dusun, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan.

2. Dokumentasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:33) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, didalam unit analisis yang selanjutnya akan dijadikan menjadi onjek penelitian. Dokumentasi tersebut bisa berupa dokumen resmi, arsip, berita dari media massa cetak, jurnal serta biograpi. Berikut hasil dari dokumentasi dengan para narasumber :

Gambar 1.3

Dokumentasi dengan berbagai Narasumber



(Bapak Sarwono DINPAR)



(Ibu Ida Pemilik Ayanaz)



(Bapak Puryono KADUS)



(Bapak Sudarwanto KADES)



(Ibu Rosi Pedagang)



(Bapak Karto Pemilik Kuda)



(Mas Bagas Penjaga Tiket Masuk)

1.9.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan .

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan yaitu merangkum, memilah hal-hal yang dianggap penting, memfokuskan pada suatu tujuan, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat. Bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang sedang difahami tersebut.

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah seiring waktu bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyanti, 2016).